



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Talu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK ..., tempat dan tanggal lahir ..., 09 November 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jorong ..., Nagari ..., Kecamatan Ranah ..., Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone ... dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ...@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, NIK ..., tempat dan tanggal lahir ..., 20 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Jorong ..., Nagari ..., Kecamatan Ranah ..., Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Februari 2022, telah mengajukan perkara cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Perkara Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Talu, tanggal 11 Februari 2022, dengan mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008 M/ 24 Sakban 1429 H, Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan Nomor : ... tertanggal 09 Februari 2022 berdasarkan Akta Nikah Nomor : ..., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah ..., Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jorong ..., Nagari ..., Kecamatan Ranah ..., Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik sendiri yang beralamat di Jorong ..., Nagari ..., Kecamatan Ranah ..., Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 ..., lahir tanggal 09 Juli 2009 di ...;
 - 3.2 ..., lahir tanggal 26 Februari 2012 di ...;
 - 3.3 ..., lahir tanggal 25 Mei 2016 di ...;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - a. Termohon kurang menghormati Pemohon seperti selalu acuh ketika dinasehati dan tidak memperdulikan nasehat Pemohon bahkan selalu mengulang-ulang kesalahan yang sama;
 - b. Termohon kurang jujur dalam rumah tangga terutama dalam masalah keuangan seperti Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan baru diketahui setelah ada orang yang menagih hutang Termohon tersebut ke rumah milik sendiri dan Pemohon tidak mengetahui uang tersebut diperuntukkan untuk apa padahal Pemohon tetap memberikan nafkah terhadap Termohon serta Termohon kurang komunikasi dengan Pemohon terhadap persoalan yang akan dilakukan oleh Termohon;

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Desember 2018 Termohon pergi sendiri dari rumah milik sendiri karena Termohon merasa malu disebabkan Termohon banyak hutang dan banyak orang yang menagih hutang Termohon tersebut ke rumah milik sendiri, maka sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun 2 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang kurang jujur dalam rumah tangga dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, serta ternyata ketidakhadiran Termohon *a quo* tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diminta/didengar jawaban dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Surat:

- Fotokopi Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan Nomor : ... tertanggal 09 Februari 2022 berdasarkan Akta Nikah Nomor : ..., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah ..., Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.;

II. Saksi:

1. ... bin ..., di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama ...;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah Pemohon dan Termohon yang berada di ...;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2012 Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa terungkap dari pertengkaran bahwa penyebab pertengkaran karena tidak menghormati dan tidak mempedulikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari tiga tahun lalu;

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih dari tiga tahun lalu, berdasarkan penglihatan saksi langsung, karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon saat ini dan melihat tidak ada Termohon di rumah tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil;

2. ... bin ..., di bawah sumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama ...;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah Pemohon dan Termohon yang berada di ...;

- Bahwa sampai saat ini, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa sejak akhir tahun 2012 Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

- Bahwa terungkap dari pertengkaran bahwa penyebab pertengkaran karena tidak menghormati dan tidak mempedulikan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari tiga tahun lalu;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih dari tiga tahun lalu, berdasarkan penglihatan saksi langsung, karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon saat ini dan melihat tidak ada Termohon di rumah tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon Putusan atas perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon secara *in person* tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka usaha damai sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, begitu juga dengan usaha mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, namun Majelis tetap berupaya menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan menjalin kembali hubungan yang harmonis dengan Termohon, namun nasehat itu juga tidak berhasil, maka dilanjutkanlah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2012, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon serta tidak jujur dalam masalah rumah tangga, dan karena sikap Termohon di atas, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tiga tahun dua bulan lamanya sampai dengan sekarang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Pemohon tersebut dapat dikualifikasi memuat ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat didengar jawaban Termohon karena Termohon tidak pernah hadir atau mengutus wakil/kuasanya yang sah di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi serta patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, maka Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Termohon tersebut berarti dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai talak dan juga dengan memperhatikan SEMA Nomor 03 Tahun 2015, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diberi tanda P., alat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai sepuluh ribu rupiah, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon yang diberi tanda P., menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil alat bukti karena merupakan foto kopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang menyatakan bahwa sejak akhir tahun 2012 lalu, saksi-saksi tersebut melihat bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menghormati dan tidak mempedulikan Pemohon, mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon paling kurang sejak lebih dari tiga tahun lalu, dan telah pula didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil, menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada kualitas terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan dua orang saksi di atas, yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P dan keterangan saksi-saksi di atas, telah diperoleh fakta-fakta kejadian yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini merupakan suami istri yang sah

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah ..., Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah menikah, keduanya terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon yang berada di ...;

3. Bahwa sejak akhir tahun 2012 lalu, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran mulut yang disebabkan oleh karena Termohon tidak menghormati dan tidak mempedulikan Pemohon;

4. Bahwa sejak lebih dari tiga tahun lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, saat ini keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;

5. Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2012 lalu. Antara Pemohon dan Termohon juga telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sejak lebih dari tiga tahun lalu;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak akhir tahun 2012, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, dan telah terbukti pula keduanya berpisah tempat tinggal sejak lebih dari tiga tahun lalu, tanpa ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya, tidak saling mempedulikan lagi, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama);

Maenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena lebih dari tiga tahun berpisah, tanpa komunikasi yang baik antara suami istri merupakan bukti bahwa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sudah mencerminkan *broken marriage* sedangkan keduanya sudah tidak lagi saling mempedulikan, sejak lebih dari tiga tahun lalu, Majelis Hakim juga telah melaksanakan upaya menasehati Pemohon agar bersabar di persidangan namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, karena Pemohon tidak tahan lagi dengan perbuatan Termohon sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon akan sangat sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah di dalam surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 1 dan Pasal 3 K.H.I.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan "bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum majelis dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut "Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila *Judex Factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan Termohon yang tidak pernah hadir lagi di

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sejalan dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1443 H. oleh Kami Rinaldi M., S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I., L.LM dan Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Defrizal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Latif Mustofa, S.H.I., L.LM

Rinaldi M., S.H.I.

Anggota Majelis,

Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Defrizal

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Proses	:	Rp 50.000,00
Panggilan	:	Rp190.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp310.000,00

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Talu